

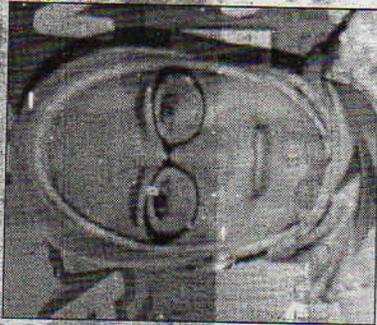
Meneliks Penanganan Kaum Disabilitas di Kabupaten Gorontalo

SALAH satu instrumen penting yang menjadi sebuah kemitraan dan bahkan sudah menjadi kewajiban negara adalah mengakui eksistensi setiap warga negara tanpa memandang gender, keturunan dan status sosial ekonomi masyarakat dalam pelibatan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal di daerah-daerah. Selain sudah menjadi konsensus nasional yang dijamin oleh konstitusi, juga merupakan bagian dari penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Salah satu kelompok masyarakat yang selayaknya mendapatkan perhatian adalah kelompok masyarakat penyandang cacat atau mereka penyandang disabilitas, baik cacat bawaan maupun cacat karena unsur-unsur lain seperti kecelakaan. Kelompok masyarakat penyandang cacat, di manapun ia berada memiliki kedudukan, hak kewajiban dan peran yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip itulah yang menjadi dasar dan pijakan utama dalam memperhatikan para penyandang cacat di negeri ini. Mengacu pada prinsip dasar itulah, Tim Pengerak PKK Kabupaten Gorontalo, selain melakukan upaya-upaya untuk mendukung dan mensupport Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi para pengalangan semangat dan komitmen seluruh pengurus PKK di setiap desa untuk memfasilitasi dan membantu menyediakan kelompok masyarakat disabilitas di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang patut

diapresiasi adalah semenjak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan ruang dan peluang kepada penyandang cacat untuk direkrut dan ditempatkan menjadi tenaga honorer di Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, untuk menunjang kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki program khusus dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat penyandang cacat. Meski tidak ada data yang pasti berapa jumlah penyandang cacat yang berstatus honorer di Kabupaten Gorontalo, namun sudah dapat dipastikan bahwa saat ini setiap instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gorontalo sudah mengkomodir penyandang disabilitas sebagai tenaga honorer. Hal ini sudah dicanangkan oleh Bupati Gorontalo pada tahun 2016 lalu.

Dalam program dan kebijakan ini, terdapat beberapa ketenuan, misalnya penyandang cacat harus memiliki kompetensi di bidang komputer atau administrasi atau pekerjaan-pekerjaan yang memiliki spesifikasi khusus. Oleh karena itu, meski selama ini secara nasional telah berlaku pendidikan inklusif, namun di daerah-daerah perlu penelusuran dan pendalaman



Oleh:
Dr. Hefory Armin Naway, Walikota

lebih jauh jenis-jenis keterampilan apa saja yang terbuka peluang untuk ditangani oleh penyandang cacat di masing-masing desa dan Kabupaten Gorontalo kelompok-kelompok usaha yang ditangani secara berkompeter untuk itu.

Artinya, dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat penyandang cacat di Kabupaten Gorontalo, Tim Pengerak PKK Kabupaten Gorontalo tidak hanya mendukung dan mendukung program rekrutmen tenaga honorer untuk penyandang disabilitas, tapi juga menancangkan program bagaimana penyandang cacat di Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari anggota masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Untuk menunjang program tersebut, TP-PKK Kabupaten Gorontalo telah dan akan terus melakukan tahapan program antara lain, 1). Melakukan pendataan terhadap masyarakat penyandang cacat hingga ke desa-desa dengan spesifikasi dan jenis kecacatan yang disandang oleh masing-masing penyandang disabilitas. Dalam proses pendataan ini, PKK menerjunkan pengurus PKK di desa-desa bekerjasama dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Gorontalo. 2). Berdasarkan data data yang dihimpun tersebut, TP-PKK Kabupaten Gorontalo akan mengidentifikasi, merumuskan dan

memprogramkan peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan atau bisa digarap oleh para penyandang cacat di masing-masing desa dan bila memungkinkan akan dibentuk kelompok-kelompok usaha yang dibina oleh instansi-instansi yang berkompeter untuk itu.

Yang jelas dalam melakukan penanganan dan keberpihakan terhadap para penyandang disabilitas ini, dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan semua unsur, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Kecamatan dan Desa serta unsur-unsur lainnya.

Sebagai mitra Pemerintah Daerah, PKK Kabupaten Gorontalo akan terus mensupport dan memberi penguatan terhadap keberpihakan terhadap para penyandang disabilitas agar apa yang dicita-citakan oleh konstitusi untuk mewujudkan keadilan di negeri ini akan tercapai dengan baik. Kepada para pengurus PKK di desa-desa di wilayah Kabupaten Gorontalo diharapkan proaktif untuk mengetahui dan mendafta para penyandang cacat di wilayahnya masing-masing untuk memudahkan identifikasi dan perumusan formula maupun program bagi penyandang disabilitas. Prinsip yang menjadi landasan utama dalam program ini adalah dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan untuk mengumpulkan amal jariah yang sebanyak-banyaknya. Semoga ()

Penulis Ketua TP2TP2A
Kabupaten Gorontalo